

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 11, NO. 1 JUNI 2020

P-ISSN: 2086-6313  
E-ISSN: 2528-4673

<b>Pelindung</b>	Sekretariat Jenderal DPR RI
<b>Penanggung Jawab</b>	Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
<b>Dewan Redaksi</b>	<b>Ketua:</b> Dr. Hariyadi, S.IP., M.P.P. ( <i>Public Policy in Economic</i> ) <b>Anggota:</b> Mandala Harefa, S.E., M.E. ( <i>Public Policy in Economic</i> ) Drs. Juli Panglima S., M.M. ( <i>Public Policy in Economic</i> ) Achmad Sani A., S.E., M.A. ( <i>Public Policy in Economic</i> ) Dr. Iwan Hermawan, S.P. M.Si. ( <i>Public Policy in Economic</i> )
<b>Mitra Bestari</b>	Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S. ( <i>Agricultural Economics</i> , Kementerian Pertanian) Prof. (Riset) Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, M.A. ( <i>Public Policy</i> , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Dr. Ir. Triarko Nurlambang, M.A. ( <i>Environmental Science</i> , Universitas Indonesia) Dr. Ir. Erwidodo, M.S. ( <i>Agricultural Economics</i> , Kementerian Pertanian) Dr. Ir. Solikin M. Juhro, M.A. ( <i>Economics and Monetary Policy</i> , Bank Indonesia)
<b>Redaksi Pelaksana</b>	<b>Ketua:</b> Dewi Wuryandani, S.T., M.M. <b>Anggota:</b> Eka Budiyanti, S.Si., M.SE. Hilma Meilani, S.T., MBA Niken Paramita, S.E., M.Ak. Masyithah A., S.Si., M.E. Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. Izzaty, S.T., M.E.
<b>Distributor</b>	Yeti Ifana, S.E. Hasanul Kabri, SE., M.Si.
<b>Layout Naskah</b>	Achmad Muchaddam
<b>Alamat Redaksi</b>	Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Gedung Nusantara 1, Lantai 2 Jakarta Pusat 10270 Telp.: 021-5715891; Faks.: 021-5756067 Email: <a href="mailto:jurnalekp@dpr.go.id">jurnalekp@dpr.go.id</a>
<b>P-ISSN</b>	2086-6313
<b>E-ISSN</b>	2528-4673

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

Berisi tulisan yang mempunyai relevansi dengan isu ekonomi dan kebijakan publik serta mencerminkan motto Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik: "**Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi**".

JEKP diterbitkan sejak Juli 2010 oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 11, NO. 1, JUNI 2020

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

**DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERDAGANGAN  
DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH DAN TINGGI ASIA**

*Nathania Riris Michico Tambunan*

**POTENSI, PERAN PEMERINTAH, DAN TANTANGAN  
DALAM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DI INDONESIA**

*Rais Agil Bahtiar*

**MEMBANGUN SKEMA EKOLABEL PERIKANAN NASIONAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN  
TERHADAP HAK NELAYAN DAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

*Andre Notohamijoyo, Martani Huseini, Raldi H. Koestoer, dan Syafril Fauzi*

**THE DETERMINANTS OF PADDY FIELDS CONVERSION IN JAVA AND SUMATRA**

*Lusia Tri Harjanti and Yonosuke Hara*

**DETERMINAN KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS DI INDONESIA**

*Sahrul Paipan dan Muhammad Abrar*

**DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG**

*Mandala Harefa*

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 11, NO. 1, JUNI 2020

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v-vi
Abstrak .....	vii-xiv
<b>DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH DAN TINGGI ASIA</b>	
<i>Nathania Riris Michico Tambunan</i> .....	1-12
<b>POTENSI, PERAN PEMERINTAH, DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DI INDONESIA</b>	
<i>Rais Agil Bahtiar</i> .....	13-25
<b>MEMBANGUN SKEMA EKOLABEL PERIKANAN NASIONAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NELAYAN DAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>	
<i>Andre Notohamijoyo, Martani Huseini, Raldi H. Koestoer, dan Syafril Fauzi</i> .....	27-38
<b>THE DETERMINANTS OF PADDY FIELDS CONVERSION IN JAVA AND SUMATRA</b>	
<i>Lusia Tri Harjanti and Yonosuke Hara</i> .....	39-52
<b>DETERMINAN KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS DI INDONESIA</b>	
<i>Sahrul Paipan dan Muhammad Abrar</i> .....	53-64
<b>DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG</b>	
<i>Mandala Harefa</i> .....	65-77

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

## KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI kembali menyajikan beberapa tulisan bagi pembaca. Edisi JEKP Volume 11 (1) kali ini mengawali masa dekade kedua sejak penerbitannya pada tahun 2010 dengan 6 (enam) tulisan. Edisi kali ini dibuka oleh tulisan *pertama* yang diisi oleh tulisan dari Nathania R.M. Tambunan yang berjudul “Dampak Demokrasi terhadap Perdagangan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah dan Tinggi Asia”. Tulisan ini mengawali kajiannya dengan satu perspektif bahwa ada hubungan antara dinamika sistem demokrasi dengan kemajuan ekonomi, khususnya perdagangan. Penelitian ini menguji sejauh mana dampak demokrasi terhadap perdagangan, khususnya di kawasan Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi dan fokus pada 11 negara berdasarkan tingkat pendapatan selama 2009-2018, penelitian ini menemukan bahwa sistem demokrasi di negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah.

Tulisan *kedua* disajikan oleh Rais Agil Bahtiar berjudul “Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan *E-Commerce di Indonesia*”. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, *e-commerce* menjadi tren perdagangan berbasis internet secara global. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja *online* mencapai 24,47 juta pengguna pada tahun 2016 dan selama setahun terakhir nilai perdagangannya mencapai Rp74,6 triliun. Tulisan yang merupakan tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa praktik *e-commerce* terbukti telah meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan karena hematnya biaya transaksi, mampu menembus batasan ruang dan waktu, mudahnya biaya pengiriman, mudahnya interaksi antara penjual dan pembeli, dan rendahnya biaya iklan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi *e-commerce* selain upaya penguatan nilai dan pemasaran produk, pengelolaan isu keamanan dan perlindungan konsumen, dan perpajakan perlu disasar.

Tulisan berikutnya, *ketiga*, berjudul “Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan” ditulis secara bersama-sama oleh Andre Notohamijoyo, Martani Huseini, Raldi H. Koestoer, dan Syafril Fauzi. Hasil penelitian yang mengangkat isu arti penting skema *ecolabelling* dalam bidang perikanan ini melihat bobot kepentingan dan prioritas setiap skema ekolabel untuk mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tulisan dengan metode campuran, yakni Metode Delphi berbasis *purposive sampling* dan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan *stakeholder*, termasuk nelayan kecil di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melembagakan skema tersebut untuk memastikan kredibilitasnya. Dengan demikian, pengembangan ekolabel perikanan nasional sebagai merek produk perikanan yang berkelanjutan diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Tulisan *keempat*, berjudul “*The Determinants of Paddy Fields Conversion in Java and Sumatera*” (Faktor-Faktor Penentu Konversi Luas Lahan Sawah di Jawa dan Sumatera) ditulis oleh Lusya Tri Harjanti dan Yonosuke Hara. Tulisan ini mengangkat hasil penelitian tentang isu klasik tetapi mendasar, yakni isu konversi lahan sawah. Dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang memengaruhi konversi lahan tersebut adalah PDRB sektor pertanian dan jasa, serta kepadatan penduduk. PDRB sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Pulau Sumatera dan sebaliknya untuk PDRB sektor industri. Melalui analisis geospasial, konversi lahan sawah didominasi untuk pemukiman di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Sumatera hal itu cenderung untuk perkebunan, misalnya kelapa sawit. Dengan demikian, intervensi afirmatif pemerintah untuk mengerem fenomena tersebut menjadi penting guna mempertahankan peran kedua wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Tulisan *kelima* ditulis oleh Sahrul Paipan dan Muhammad Abrar. Tulisan hasil penelitian yang berjudul “Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia” memfokuskan pada isu produksi beras nasional dan pengaruhnya terhadap dinamika impor beras dalam jangka pendek dan panjang dalam konteks isu ketergantungan impor beras selama kurun waktu 1992-2017. Penelitian yang menggunakan data sekunder dan melibatkan *Error Correction Model (ECM)* tersebut menunjukkan bahwa produksi beras nasional tidak memengaruhi impor beras secara signifikan dalam jangka panjang tetapi sebaliknya dalam jangka pendek.

Konsumsi beras nasional, apresiasi rupiah, cadangan devisa, dan harga beras domestik berhubungan positif dan signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk memengaruhi impor beras. Impor beras lebih disebabkan karena kurang maksimalnya penyerapan beras oleh Bulog dan terus meningkatnya konsumsi beras nasional. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk menyerap surplus beras petani dan memperkuat kebijakan diversifikasi pangan menjadi penting.

*Last but not least*, tulisan *keenam*, ditulis oleh Mandala Harefa, berjudul “Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung”. Beberapa tahun terakhir sektor pariwisata telah menjadi salah satu penopang sumber penerimaan daerah yang penting. Tulisan ini memfokuskan pada isu peran sektor pariwisata sebagai salah faktor penting yang turut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi dan/atau investasi, dan menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa proporsi dan kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata meningkat secara signifikan namun masih belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran sektor ini dibutuhkan kemauan politik pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, dan kegiatan promosi.

Harapan kami tulisan-tulisan dalam edisi kali ini dapat semakin memperkaya pengetahuan, kajian lebih lanjut, dan diskursus dalam isu kebijakan terkait khususnya bagi lembaga DPR RI. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2020  
Hormat kami,  
**Tim Redaksi**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 11, NO. 1, JUNI 2020

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Nathania Riris Michico Tambunan** (Universitas Indonesia)

## **DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH DAN TINGGI ASIA**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 1-12

### **Abstrak**

Sistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.

**Kata kunci:** demokrasi, perdagangan, Model Gravitasi, negara berpendapatan menengah, negara berpendapatan tinggi



Rais Agil Bahtiar (Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI)

## POTENSI, PERAN PEMERINTAH, DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN *E-COMMERCE* DI INDONESIA

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 13-25

### Abstrak

*E-commerce* merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja *online* dan transaksi toko *online* cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (a) potensi dari penerapan *e-commerce* terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas *e-commerce*, dan (c) tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas *e-commerce* dalam ekonomi nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik *e-commerce* mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan enam strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Sedangkan tantangan dalam rangka pengembangan aktivitas *e-commerce* adalah keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur, serta perpajakan terkait transaksi *e-commerce*.

**Kata kunci:** internet, *e-commerce*, ekonomi digital

Andre Notohamijoyo (Universitas Indonesia), Martani Huseini (Universitas Indonesia), Raldi H. Koestoer (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), dan Syafril Fauzi (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

## MEMBANGUN SKEMA EKOLABEL PERIKANAN NASIONAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NELAYAN DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 27-38

### Abstrak

World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui *ecolabelling*. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* dengan metode Delphi berbasis *purposive sampling* serta metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan *stakeholder* termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan *stakeholder* terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

**Kata kunci:** ekolabel perikanan, nelayan kecil, hak nelayan, dukungan *stakeholder*

**Lusia Tri Harjanti** (Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia) dan  
**Yonosuke Hara** (Program Ekonomi, Perencanaan dan Kebijakan Publik, GRIPS, Jepang)

### **FAKTOR-FAKTOR PENENTU KONVERSI LUAS LAHAN SAWAH DI JAWA DAN SUMATERA**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 39-52

#### **Abstrak**

Konversi lahan sawah di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang nyata dan signifikan untuk menanggulangi isu tersebut. Salah satu langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai lumbung padi nasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini menganalisa faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian, PDRB di sektor jasa, dan kepadatan penduduk. Sebaliknya, PDRB di sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Sumatera, melainkan PDRB di sektor industri memberikan dampak terhadap konversi lahan sawah di Sumatera. Faktor-faktor lain yang memengaruhi konversi lahan sawah di Sumatera adalah PDRB di sektor pertanian dan kepadatan penduduk. Analisis geospasial juga digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis geospasial, perubahan lahan sawah di Pulau Jawa didominasi menjadi area pemukiman, sedangkan sebagian besar perubahan sawah di Sumatera berubah menjadi area tanaman yang diduga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berkembang diduga karena pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Sumatera.

**Kata kunci:** lahan sawah, konversi lahan, geospasial

**Sahrul Paipan** (Universitas Syiah Kuala) dan **Muhammad Abrar** (Universitas Syiah Kuala)

### **DETERMINAN KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS DI INDONESIA**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 53-64

#### **Abstrak**

Beras merupakan kebutuhan pokok utama bagi penduduk Indonesia, namun pemerintah cenderung mencukupi kelebihan kebutuhan permintaan beras dengan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketergantungan impor beras di Indonesia periode tahun 1992-2017. Model ECM digunakan untuk menjawab tujuan tersebut, baik melihat pengaruhnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel bebas terhadap impor beras. Data sekunder bersumber dari *World Bank*, *FAO* dan *BPS*. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang produksi beras tidak memengaruhi impor beras, namun dalam jangka pendek menjadi signifikan dan positif. Konsumsi beras, apresiasi rupiah, cadangan devisa, dan harga beras domestik berhubungan positif dan signifikan memengaruhi impor beras dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sisi lain, PDB memengaruhi impor beras dan harga relatif tidak signifikan memengaruhi impor beras, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Impor beras terjadi disebabkan karena kurang maksimal Bulog menyerap beras petani dan meningkatnya konsumsi beras. Pemerintah diharapkan mampu menyerap surplus beras yang dimiliki petani dengan menjalin kerja sama langsung. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendukung kebijakan diversifikasi pangan dengan mengonsumsi aneka ragam pangan dan pangan bergizi.

**Kata kunci:** beras, impor, konsumsi, produksi, ECM

**Mandala Harefa** (Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI)

## **DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 65-77

### **Abstrak**

Beberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film *Laskar Pelangi*. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan *focus group discussion* (FGD) terhadap *stakeholders* terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, pariwisata, proporsi, wisatawan, dampak

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 11, NO. 1, JUNE 2020

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Nathania Riris Michico Tambunan** (University of Indonesia)

## **IMPACTS OF DEMOCRACY ON TRADE ACTIVITY IN ASIA'S MIDDLE AND HIGH INCOME COUNTRIES**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 1-12

### **Abstract**

*A democratic system is a way as the basis for supporting the trade process among countries. Increased international trade can generate economic growth. But some parties claim that democracy actually would hinder or even threatens the trade flows. That dynamic situation is increasingly apparent in middle and high-income countries. This study aims to determine whether democracy impacts on trade, especially in Asia. Using the Gravity Model, this study focuses on 11 countries divided by their income from period 2009 to 2018. The high-income countries chosen in this study are Japan, Singapore, South Korea, and Brunei Darussalam, and middle-income countries are China, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Pakistan, and India. Using the panel data regression method, the results of this study states that democracy in the Asia Countries affected trade significantly. It was also found that trade in high-income countries was not affected by democracy, while trade in low-income countries was strongly influenced by democracy.*

**Keywords:** *democracy, trade, Gravity Model, middle income countries, high income countries*

Rais Agil Bahtiar (Research Center Secretariat General of DPR RI)

### **POTENCY, GOVERNMENT ROLE, AND CHALLENGES OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN INDONESIA**

JEKP, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 13-25

#### **Abstract**

*E-commerce is one of the rising stars from the rapid internet development and becomes global trends for the past ten years. In Indonesia, the number of online shopping site usage and also online transactions tends to increase although infrastructure and regulation are still left behind. These conditions are an opportunity and need a comprehensive policy to leverage how to develop and multiple the benefit from digitalization activity. This paper aims to analyze (a) the potential of e-commerce application for supporting economic growth, (b) the role of government in driving the growth of e-commerce activities, and (c) the challenges to maximize e-commerce activities in the national economy. This paper used a qualitative approach with a literature review method. The finding showed that e-commerce can improve economic growth because it stimulates saving transaction costs, eliminates space and time restrictions, reduces shipping costs, minimizes transportation barriers, facilitates communication between sellers and buyers, and reduces advertising and transportation costs. The government has a pivotal role to implement six strategies for encouraging digital economics, namely knowledge development, knowledge dissemination, subsidies, mobilization, the direction of innovation, and standard-setting. To develop e-commerce activities, there are main challenges that should be copped, which are security and consumer protection, logistics and infrastructure, and taxation related to e-commerce transactions.*

**Keywords:** internet, e-commerce, digital economy

Andre Notohamijoyo (University of Indonesia), Martani Huseini (University of Indonesia), Raldi H. Koestoer (Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia), and Syafril Fauzi (Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia)

### **BUILDING THE NATIONAL FISHERIES ECOLABELING SCHEME AS A FORM OF PROTECTION OF FISHERMEN RIGHTS AND FISHERIES RESOURCES**

JEKP, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 27-38

#### **Abstract**

*World Bank & FAO state that 75 percent of global fisheries resources face the threat of depletion or reduced stock due to excessive fishing and environmental damage. Indonesia also has a similar situation. It encouraged a number of parties to push for a mechanism for controlling the production and consumption of sustainable through ecolabeling. There are many weaknesses in the implementation of the certification system in developing countries. The lack of protection for fishermen's rights is one of the main problems of ecolabeling. The aim of study is to see the importance and priority of each ecolabel scheme that effectively promotes sustainable fisheries management. This study uses a mixed-method with a purposive sampling-based Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results indicate that the national ecolabel scheme is a priority choice of stakeholders including small fishermen in Indonesia. The trust of stakeholders is the basic capital in its preparation. The Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries needs to immediately initiate the national ecolabel scheme. Another challenge is how to develop the national fisheries ecolabeling as a brand of sustainable fishery products and encourages the welfare of fishermen.*

**Keywords:** fisheries ecolabel, small scale fishermen, fishermen rights, stakeholder support

**Lusia Tri Harjanti** (Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency) and **Yonosuke Hara** (Economics and Public Policy, GRIPS)

### **THE DETERMINANTS OF PADDY FIELDS CONVERSION IN JAVA AND SUMATRA**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 39-52

#### **Abstract**

*Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high and without significant effort by the government on the existing paddy fields, national food security and food self-sufficiency in Indonesia will be at risk. Therefore, to address this issue, the government needs to identify the main drivers of paddy fields conversion in Indonesia, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. Employing panel data of 256 in the regencies/cities level in Java and Sumatra from 2010-2017, this study investigates the determinants of paddy fields conversion in Java and Sumatra. This study identified that the factors which affected paddy fields conversion in Java are the gross regional domestic product (GRDP) in agriculture sector, the GRDP in service sector, and population density. In contrary, the GRDP in service sector doesn't significant with the changed of paddy fields in Sumatra, however GRDP in industry sector affect the paddy fields conversion in Sumatra. Other variables which affected paddy fields conversion in Sumatra are GRDP in agricultural sector and population density. Moreover, geospatial analysis also used in this study. It reveals that the changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra suspected turned dominated into palm oil plantation due to the growth of oil palm industry.*

**Keywords:** *paddy fields, land conversion, geospatial*

**Sahrul Paipan** (Syiah Kuala University) dan **Muhammad Abrar** (Syiah Kuala University)

### **DETERMINANTS OF RICE IMPORT DEPENDENCY IN INDONESIA**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 53-64

#### **Abstract**

*Rice is the staple food for most Indonesian people, but the government tends to import rice to meet their excess demand. This study aims to analyze the determinants of rice import dependence in the Indonesia period 1992-2017. ECM Model is applied to reveal the effects between independent variables on rice imports short-term and the long-term. Secondary data is sourced from the World Bank, FAO, and BPS. The research results show that in the long run the rice production does not influence rice imports, but it is significant and positive in the short term. Rice consumption, rupiah appreciation, foreign exchange reserves, and domestic rice prices influence rice imports positively and significantly in the long and short term. Meanwhile, GDP influences rice imports negatively and relative prices do not significantly influence rice imports in the long run and also short run. Imports of rice are caused by the lack of maximum rice absorption by The Indonesian Logistic Bureau (Bulog) and increasing rice consumption. The government should absorb the surplus of farmer's rice by establishing direct cooperation between the government and farmers. The community can support the food diversification policy with various food and nutritious food.*

**Keywords:** *rice, import, consumption, production, ECM*

**IMPACT OF TOURISM SECTOR ON REGIONAL INCOME IN BELITUNG REGENCY**

*JEKP*, Vol. 11, No. 1, June 2020, pp. 65-77

**Abstract**

*In recent years tourism becomes one of the important economic sectors as a source of regional income. The local governments that are able to manage tourism objects well will have greater opportunities to increase local revenue (PAD). Belitung Regency is one of the regions that have a major income source from the tourism sector and it has also got famous since the film Laskar Pelangi. To develop the tourism sector is not easy, including how to provide a high contribution to regional income. This study aims to analyze the problem and development of the tourism sector's contribution to local revenue in the Belitung Regency. A descriptive qualitative method is applied to answer the research. Primary data is obtained through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with relevant stakeholders, while secondary data is sourced from various publications. The results show that regional income from Belitung Regency's tourism sector tend to increase. The direct impact is obtained from the construction of hotels, restaurants, and transportation procurement. While various tax revenues (hotels and restaurants) and retribution from tourism activities as an indirect impact. Based on the total of regional income, the contribution of the tourism sector's revenue is less significant. Some points that need to be considered in order to optimize the tourism sector's revenue in Belitung Regency are to overcome the limitations of tourism object supporting facilities, encourage the quality and quantity of tourism human resources, and encourage more intensive tourism promotion.*

**Keywords:** *local revenue, tourism, proportion, tourists, impact*